



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Pada sub bab ini penulis akan memaparkan salah satu penelitian terdahulu yang terkait dengan analisis pemberitaan suatu media mengenai pemilu pada suatu daerah, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Subekti W. Priyadharma, seorang pengajar di Universitas Padjadjaran pada tahun 2008 yang berjudul “Pluralisme Internal dalam Berita Politik *Okezone.com*: Pemilu Jawa Barat 2008”. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui apakah media *okezone.com* memberikan pemberitaan mengenai setiap kandidat Pemilu Jawa Barat 2008 dengan berimbang dan adil, sejak salah satu kandidatnya yaitu Agum Gumelar menjabat *Honorary Chairman* dari Media Nusantara Citra (MNC), perusahaan pemilik *okezone.com*.

Pengukuran pluralisme internal yang digunakan dalam penelitian ini berdasar pada Graber (1998), yang membagi pemberitaan kampanye dalam empat kategori: *trivial* (hal sepele), *campaigns* (kampanye), *issues* (isu-isu), *candidate information* (informasi mengenai kandidat).

Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa berita-berita *okezone.com* mengenai Pemilu Jawa Barat 2008 paling banyak masuk dalam kategori informasi sepele (*trivial*) dan informasi kampanye (*campaigns*) Data ini

membuktikan argumen Anwar (2001:42) dan Nurhayati et al. (2000) bahwa media di Indonesia lebih banyak menyajikan berita kampanye politik yang bersifat menghibur (*entertainment*).

Selain itu *okezone.com* lebih memberikan *image* positif bagi pasangan Cagub-Cawagub Agum Gumelar dan Nu'man Abdul Hakim dibandingkan dengan pasangan lain.

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa *okezone.com* tidak sepenuhnya mengikuti prinsip Pluralisme Internal dalam penyajian berita Pemilukada Jawa Barat 2008, serta tidak banyak berkontribusi dalam memberikan pendidikan politik kepada pembacanya dan warga Jawa Barat karena *okezone.com* tidak memberikan porsi pemberitaan yang sama mengenai semua pasangan calon, dan lebih condong kepada satu pasangan saja.

Penelitian tersebut memiliki banyak persamaan dengan penelitian ini, dari topik, latar belakang, tujuan, metodologi serta teori yang digunakan. Namun yang membedakan adalah, wilayah objek kajian penelitian, di mana penelitian ini memilih objek peliputan Pemilukada wilayah Banten. Jenis media yang dianalisa dalam kedua penelitian ini juga berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Priyadharma menganalisa media online *okezone.com*, sementara penelitian ini menganalisa media televisi lokal *Cahaya TV Banten*.

Penelitian mengenai peliputan pemilihan kepala daerah sebelumnya juga pernah dilakukan oleh Dewan Pers yang berjudul “Analisis Isi Pemberitaan

Suratkabar atas Pilkada di Kabupaten Bandung, Surabaya, Medan, dan Semarang”. Penelitian ini mempermasalahkan apakah media lokal sudah menegakkan prinsip dasar jurnalisme yang tidak berpihak dan berimbang dalam pemberitaannya mengenai setiap kandidat pemilihan kepala daerah, serta bagaimana penggambaran media mengenai setiap kandidat, apakah proporsional atau tidak, dan apakah dicampur dengan opini atau tidak.

Dalam penelitian tersebut ditemukan fakta bahwa para pelaku politik lokal mulai memasuki bisnis media dan menyalurkan kepentingan-kepentingan politik mereka melalui media tersebut. Di Kalimantan Timur misalnya, harian *Poskota* didirikan oleh Syaukani, Bupati Kutai Kertanegara dan Fuad Arieiph, Ketua DPD Golkar Kalimantan Timur, mendirikan *Swara Kaltim*. Contoh media lain yang didirikan oleh politisi daerah yaitu harian *Limboto Express* yang didirikan oleh Ahmad Hoesa Pakaya, yang saat itu menjabat sebagai Bupati Gorontalo dan Ketua Golkar Propinsi Gorontalo.

Kesimpulan dari penelitian tersebut menunjukkan adanya keberpihakan terhadap pasangan kandidat tertentu dalam pemberitaan pemilihan daerah oleh media lokal, selain itu penggambaran para kandidat juga tidak proporsional, ada kandidat yang selalu digambarkan secara positif, sementara penggambaran positif mengenai kandidat lain sangat sedikit dan cenderung menggambarkannya secara negatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewan Pers ini memberikan gambaran umum bagi penulis bagaimana relasi atau kedekatan para pelaku politik lokal daerah dengan media lokal. Relasi tersebut terkadang disalahgunakan, menjadi alat politik untuk menunggangi media lokal sebagai corong partai atau pelaku politik yang bersangkutan.

2.2. Teori dan Konsep

2.2.1. Teori Tanggung Jawab Sosial Media

Teori atau sistem media massa tanggung jawab sosial termasuk dalam teori normatif media massa, yang dikemukakan oleh Denis McQuail dalam bukunya *McQuail's Mass Communication Theory*. Dalam buku tersebut disebutkan bahwa ideologi yang tersingkap dari setiap pesan yang disampaikan oleh media di suatu negara dipengaruhi oleh pihak-pihak penggerak media tersebut, pemilik media, termasuk sistem pemerintahan negaranya.

Ardial, dalam bukunya berjudul *Komunikasi Politik* (2009: 166) menulis, selain teori media massa (pers) tanggung jawab sosial, McQuail mengemukakan beberapa teori atau sistem normatif media massa lain yang dapat diterapkan di suatu negara, yaitu teori pers otoriter, teori pers bebas, teori pers Soviet, teori pers pembangunan, dan teori pers demokratik partisipan.

Teori ini awalnya berasal dari gagasan orang Amerika (*The Commission of Freedom of the Press; Hutckins, 1947*). Asumsinya adalah bahwa sistem

kebebasan pers telah gagal dan tidak mampu melindungi kepentingan khalayak. Maka, dasar pemikiran teori ini adalah kebebasan pers harus sejalan juga dengan tanggung jawab kepada masyarakat. Dalam teori ini, kebebasan pers masih dipertahankan namun harus sejalan dengan kewajibannya kepada masyarakat dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu dengan menyiarkan berita yang obyektif dan tidak meresahkan masyarakat.

Ardial (2009: 168) kemudian kembali mengutip prinsip utama sistem tanggung jawab sosial menurut DeVito, yaitu:

1. Media seharusnya menerima dan memenuhi kewajiban tertentu kepada masyarakat.
2. Kewajiban-kewajiban tersebut perlu dipenuhi dengan menetapkan standar-standar profesionalisme yang menyangkut keinformasian, kebenaran, akurasi, objektivitas, dan keseimbangan.
3. Dalam menerima dan melaksanakan kewajiban tersebut, media seyogyanya dapat mengatur diri sendiri sesuai kerangka hukum dan kelembagaan yang berlaku.
4. Media seyogyanya menghindarkan diri dari setiap upaya yang dapat menjurus ke tindak kejahatan, kekerasan, merusak tatanan sosial, atau menyakiti kelompok-kelompok minoritas.
5. Media secara keseluruhan hendaknya bersifat pluralistik dan merefleksikan kebinekaan masyarakat, memberikan kesempatan yang

sama untuk mengekspresikan berbagai sudut pandang serta memberikan jaminan hak jawab.

6. Masyarakat dan publik, memiliki hak untuk menuntut standar kinerja yang tinggi dari media massa, dan karenanya intervensi dapat dibenarkan mengingat media massa merupakan *public good*.
7. Wartawan dan kalangan profesional media lainnya bertanggung jawab terhadap masyarakat, pihak majikan, serta pasar.

2.2.2. Fungsi Sosial Media Massa

Banyak opini publik dan persepsi mengenai sesuatu yang terjadi di masyarakat terbentuk karena peran serta media apalagi ketika sebagian besar masyarakat semakin hari semakin menggantungkan rasa keingintahuannya pada media, sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Pendapat tersebut sejalan dengan lima fungsi komunikasi massa menurut DeVito yang dikutip oleh Ardianto (2007: 23-28), yaitu meyakinkan (*to persuade*), menganugerahkan status, membius (*narcotization*), menciptakan rasa kebersatuan, privatisasi dan hubungan parasosial.

Fungsi meyakinkan adalah usaha untuk memperkuat atau mengubah sikap, kepercayaan atau nilai seseorang, menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu, dan memperkenalkan etika atau menawarkan sistem nilai tertentu.

Fungsi penganugerahan status yang dilakukan media, terjadi ketika berita yang disebarkan melaporkan kegiatan beberapa individu tertentu sehingga prestise (gengsi) mereka meningkat.

Sementara fungsi yang paling menarik dari media massa adalah fungsi membius, yang terjadi ketika media menyajikan informasi tentang sesuatu dan penerima informasi percaya bahwa harus mengambil suatu tindakan tertentu, tanpa sadar bahwa mereka sedang berada di bawah pengaruh penyajian media.

Fungsi menciptakan rasa kebersatuan terjadi ketika seorang audiens media merasa menjadi anggota dari sebuah kelompok. Fungsi media yang terakhir menurut DeVito adalah privatisasi, di mana seorang audiens media cenderung menarik diri dari kelompok sosial akibat terlalu banyak informasi yang dijejalkan oleh media bagi audiensnya.

Sedangkan menurut Menurut Hafied (2000) fungsi media antara lain:

- a. Pengawasan (*Surveillance*), adalah memberi informasi dan menyediakan berita.
- b. Korelasi (*Correlation*), adalah seleksi dan interpretasi informasi tentang lingkungan.
- c. Penyampaian warisan budaya (*Transmission of the Social Heritage*), merupakan suatu fungsi dimana media menyampaikan informasi, nilai, dan norma dari suatu generasi ke generasi berikutnya atau dari anggota masyarakat ke kaum pendatang.

- d. Hiburan (*Entertainment*), dimaksudkan untuk memberi waktu istirahat dari masalah setiap hari dan mengisi waktu luang

2.2.3. Peliputan Pemilu oleh Media Massa

Menurut Pawito (2009: 91), media massa memiliki posisi yang sentral dalam politik. Rancangan dan kebijakan politik perlu disebarluaskan agar publik dapat mengetahui dan mendiskusikannya dalam berbagai forum masyarakat. Dalam upaya penyebarluasan tersebut diperlukan peran media massa karena media massa dapat mengangkat suatu pesan secara massif dan menjangkau khalayak yang sangat beragam, jauh serta dalam jangkauan yang luas.

Sehubungan dengan itu, publik juga menjadikan informasi yang disebarluaskan oleh media massa sebagai rujukan bagi pemahaman dan interpretasi mereka mengenai suatu peristiwa. Pesan yang disampaikan oleh media massa kemudian akan membentuk suatu persepsi, pendapat, sikap, dan akhirnya menjadi tindakan publik, sehingga masyarakat menggantungkan pemenuhan mereka atas informasi politik pada media massa.

Di sisi lain, media massa diuntungkan dengan peristiwa politik karena media massa memperoleh informasi yang saat itu diminati oleh publik. Dengan kata lain, media massa dan politik saling berhubungan erat.

Pluralisme internal adalah salah satu aspek penting dalam jurnalisme karena memberikan kepada publik untuk memperluas pengetahuan mereka

mengenai suatu isu. Dengan adanya informasi/ pengetahuan tersebut, publik memiliki kebebasan untuk memutuskan informasi mana yang ingin mereka percayai dan lakukan. Ketersediaan informasi bagi publik tersebut akan menjadi kontribusi pengetahuan politik bagi masyarakat.

Pluralisme Internal yang digunakan adalah sistem media massa dari Jerman, yang didefinisikan sebagai keberagaman pandangan, perspektif, opini dalam sebuah media yang mengakomodir seluruh kelompok sosial dalam masyarakat, seperti dikemukakan oleh Brosius dan Zubayr (1996)..

Pengukuran pluralisme internal yang digunakan dalam penelitian ini berdasar pada Graber (1998), yang membagi pemberitaan kampanye dalam empat kategori: *trivial* (hal sepele), *campaigns* (kampanye), *issues* (isu-isu), *candidate information* (informasi mengenai kandidat).

Menurut Hanif Suranto, dkk (2008: 3) media harus menjadi *watchdog* dalam pemilu agar pemilu dapat berjalan dengan bebas dan adil. Prinsip dasar peliputan pemilu menurut mereka sejalan dengan tugas utama dan komitmen dasar jurnalistik yaitu mengungkapkan kebenaran, bekerja untuk kepentingan publik, akurat, berimbang, independen, objektif, menghindari prasangka, jujur, menghindari penggunaan kata-kata yang mempromosikan kekerasan dan diskriminasi, terbuka terhadap koreksi atas ketidakakuratan, dan yang terakhir adalah menyuarakan yang tidak bersuara.

Berikut uraian peran *watchdog* media dalam pemilu menurut Suranto, dkk:

1. Media dapat berperan dalam mengembangkan partisipasi publik dalam pemilu
2. Mendidik pemilih tentang bagaimana menggunakan hak-hak demokrasinya
3. Mengangkat suara pemilih, apa yang mereka butuhkan dan inginkan
4. Memberitakan perkembangan kampanye pemilu
5. Menyediakan informasi menyangkut platform bagi partai politik dan kandidat sekaligus rekam jejaknya
6. Memberi kesempatan partai politik untuk berdebat satu sama lain
7. Memonitor penghitungan suara dan melaporkan hasilnya
8. Meneliti dengan cermat proses pemilu untuk mengevaluasi apakah pemilu berlangsung *fairness* dan jujur.

2.2.4. Berita TV

Berita adalah informasi namun tidak semua informasi adalah berita. Menurut Morissan (2008 : 8) berita adalah informasi yang penting dan/ atau menarik bagi khalayak audien.

Terdapat beberapa kriteria yang digunakan sebagai tolok ukur atau standar apakah suatu informasi layak dikatakan sebagai sebuah berita atau tidak. Berdasarkan gagasan Salajan, Peasgood, dan Reynolds yang dikutip oleh Morissan (2008 : 8), bahwa informasi yang dipilih menjadi sebuah berita

harus memenuhi dua aspek yaitu aspek penting dan aspek menarik.

a. Aspek Penting

Suatu informasi dikatakan penting jika memiliki pengaruh dan dampak terhadap pada audiensnya. Informasi yang memiliki dampak bagi audiensnya adalah informasi yang bernilai berita. Semakin banyak audiens yang terkena dampaknya, semakin pentinglah berita tersebut, serta semakin besar pengaruh suatu berita, dampak yang timbul akan semakin langsung terhadap audiensnya. Dengan kata lain, berita terbaik biasanya berita yang bersentuhan langsung dengan kehidupan audiensnya.

Terdapat beberapa patokan yang dapat dipakai untuk menentukan apakah suatu berita memiliki dampak besar bagi audiensnya. Yang pertama adalah *nyawa manusia*. Segala informasi yang menyangkut ancaman terhadap nyawa manusia, baik yang telah maupun belum terjadi, baik langsung maupun tidak langsung, dapat menjadi berita penting.

Yang kedua adalah *uang*, berita yang berpengaruh pada kondisi keuangan dan perekonomian masyarakat adalah berita yang penting. Sementara yang terakhir adalah *gangguan*. Berita mengenai unjuk rasa besar-besaran yang mengganggu lalu lintas, berita mengenai koruptor yang diadili, atau berita mengenai kekurangan air di daerah terpencil, serta berita lain yang mengganggu rasa keadilan masyarakat merupakan berita penting yang dapat menyita perhatian audiens.

b. Aspek Menarik

Berita yang menarik adalah jika informasi yang disampaikan dalam berita tersebut mampu menimbulkan rasa kagum, lucu (humor), atau informasi yang unik atau aneh mengenai seseorang atau sesuatu, misalnya berita mengenai kontes anjing pintar, berita mengenai kambing berkaki lima, atau berita berunsur budaya unik seperti kehidupan masyarakat Eskimo yang tinggal dalam rumah es.

2.2.4.1. Jenis Berita TV

a. Berita Keras (*hard news*)

Berita keras adalah segala informasi penting dan menarik yang harus segera ditayangkan oleh media agar informasi yang hendak disampaikan tersebut dapat diketahui khalayak secepatnya. Berita keras dibagi menjadi beberapa bentuk, yakni *straight news*, *features*, dan *infotainment*.

Straight news yang dimaksudkan adalah suatu berita singkat yang hanya menyajikan informasi penting, yang mencakup *what*, *who*, *where*, *when*, *why*, dan *how*, mengenai suatu peristiwa. Berita semacam ini sangat terikat waktu, karena jika terlambat disampaikan kepada audiens informasinya akan cepat basi.

Program *Feature* menampilkan berita ringan namun menarik perhatian audiensnya karena meskipun ringan namun informasi yang disajikan bersifat lucu, unik, dan aneh sehingga menimbulkan kekaguman pada audiensnya.

Infotainment berasal dari kata “*information*” dan “*entertainment*”. Kedua kata tersebut jika digabungkan memiliki arti berita yang memberikan hiburan. Dengan kata lain, *infotainment* adalah berita yang menyajikan informasi mengenai kehidupan orang-orang yang dikenal, karena sebagian besar dari mereka bekerja di industri hiburan (Morissan, 2008: 27). *Infotainment* termasuk dalam golongan berita keras karena memuat informasi yang harus segera ditayangkan.

b. Berita Lunak

Berita lunak atau yang disebut juga dengan *soft news* adalah informasi penting dan menarik yang disampaikan secara mendalam namun tidak bersifat harus segera ditayangkan. Biasanya berita yang masuk kategori tersebut ditayangkan dalam program tersendiri di luar program berita reguler.

Program yang termasuk kategori berita lunak adalah *magazine*, *current affair*, dokumenter, dan *talk show* (Morissan, 2008: 27).

Current affair adalah program televisi yang menyajikan informasi yang berkaitan dengan suatu berita penting yang telah diberitakan sebelumnya, namun dibuat secara lebih lengkap dan mendalam.

Topik yang disajikan dalam program *magazine* mirip dengan topik-topik atau tema yang terdapat dalam suatu majalah. Informasi yang diberikan biasanya ringan namun mendalam.

Dokumenter adalah program informasi yang bertujuan untuk memberikan pembelajaran dan pendidikan namun dikemas dan disajikan secara menarik, melalui teknik pengambilan gambar, teknik penceritaan, hingga teknik penyuntingan gambar yang menarik, seperti membuat film.

Sementara *talk show* adalah program yang menampilkan satu atau beberapa orang untuk membahas suatu topik tertentu dan dipandu oleh seorang pembawa acara (*host*)

2.2.4.2.Format Berita

Dalam program berita televisi terdapat beberapa format berita yang menunjukkan bagaimana suatu berita itu ditampilkan atau disajikan. Terdapat beberapa kriteria atau persyaratan untuk menentukan suatu format berita dalam suatu program berita televisi. Berikut format penyajian berita:

a. *Reader (RDR)*

Format ini adalah cara paling mendasar untuk menyampaikan berita, di mana presenter di studio hanya membaca isi berita tanpa adanya gambar (video) yang mendukung.

b. *Voice Over (VO)*

Format ini menyajikan video atau gambar pendek yang diiringi oleh naskah berita yang dibacakan langsung oleh presenter. Biasanya digunakan untuk menceritakan suatu kejadian atau suatu topik dalam waktu singkat

c. *Reader Sound on Tape (VO/SOT)*

Terdiri dari presenter yang muncul dalam *frame* membacakan intro atau *lead* dan kemudian muncul cuplikan wawancara *soundbyte on tape* (SOT) dari narasumber berita yang bersangkutan.

d. *Voice Over-SOT*

Format ini merupakan gabungan antara format VO dan SOT, di mana VO yang diungkapkan relevan atau berkaitan dengan SOT, sementara SOT adalah bagian dari pernyataan narasumber yang penting dan spesifik, yang berkaitan dengan peristiwa yang bersangkutan.

e. *Reader Grafis (RDR-GRF)*

Format ini biasanya digunakan jika sebuah berita penting baru terjadi dan stasiun tv tersebut belum mendapatkan akses gambar dan merekamnya. Untuk menggantikannya, maka digunakan ilustrasi grafis, seperti peta, foto, atau tabel, sesuai dengan isu yang sedang dibahas.

f. Paket (*Package/ PKG*)

Format ini merupakan laporan berita lengkap dan komprehensif, dimana *lead* dibacakan oleh presenter, sedangkan naskah paket dibacakan atau dinarasikan sendiri oleh reporter atau pengisi suara yang telah direkam sebelumnya.

g. Laporan langsung (*LIVE*)

Dalam format ini presenter di studio akan berinteraksi langsung dengan reporter yang ada di lokasi kejadian atau lokasi *event* tertentu, misalnya saat meliput peristiwa kebakaran atau pertemuan politik yang penting. Format ini tentu saja membutuhkan peralatan teknis yang mendukung, seperti sambungan melalui satelit atau *microwave*.

h. *Breaking News*

Format ini merupakan format berita yang sifatnya tidak terjadwal karena dapat terjadi kapan saja. Misalnya berita mengenai kecelakaan besar, serangan teroris, musibah kebakaran, atau

bencana alam yang mengancam keselamatan jiwa, dan berdampak luas.

i. Laporan Khusus

Berita dengan format paket, lengkap dengan narasi dan *soundbyte* dan sejumlah narasumber yang memberikan analisis dan pendapat mereka. Biasanya bersifat komprehensif dan membahas berbagai peristiwa atau isu politik, hukum, criminal, dan bencana, dengan durasi setidaknya 30 menit.

2.2.5. Televisi Lokal di Indonesia

Perkembangan pertelevisian di Indonesia sendiri mengalami beberapa tahap. Diawali dengan berdirinya *Televisi Republik Indonesia (TVRI)* berdasarkan deregulasi Departemen Penerangan Indonesia pada tahun 1971. Tahap berikutnya berdiri *Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI)*, yang menjadi televisi swasta nasional pertama pada tahun 1988. Enam tahun berikutnya, tepatnya pada tanggal 24 Juli 1990, dikeluarkan surat keputusan Menteri Penerangan yang isinya membuka kesempatan bagi pihak swasta untuk mendirikan siaran televisi di Indonesia. Setelah dikeluarkannya kebijakan pemerintah tersebut, lahirlah *SCTV*, *TPI*, *ANTV*, dan *Indosiar*.

Setelah bergulingnya masa pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998 dan berdirinya masa Reformasi, bertambahlah jumlah televisi swasta nasional, yaitu *Metro TV, Trans TV, Lativi, Global TV, dan TV7*.

Kehadiran televisi lokal juga menghiasi perkembangan pertelevisian Indonesia, yang didasari oleh UU Nomor 32 tahun 2002 pasal 14 ayat 3, yang menyatakan bahwa di daerah propinsi, kabupaten, atau kota dapat didirikan lembaga penyiaran publik lokal, setelah sebelumnya penyiaran dimonopoli oleh pusat.

Perkembangan televisi lokal ditandai dengan berdirinya *Jawa Pos TV di Surabaya, Bali TV, Riau TV, Cahaya TV Banten*, dan televisi lokal di daerah lainnya yang marak mulai tahun 2002.

Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), sebuah organisasi yang didirikan sebagai wadah berkumpulnya stasiun-stasiun televisi lokal di Indonesia, dengan tujuan memperjuangkan kepentingan masyarakat lokal untuk mendapatkan informasi, serta kepentingan seluruh elemen bangsa sebagai bagian yang utuh dalam kerangka NKRI.

Kehadiran televisi lokal yang beriringan dengan semangat otonomi daerah membawa angin segar bagi masyarakat daerah, di mana setiap potensi yang dahulu kurang diketahui oleh masyarakat yang lebih luas, kini dapat dipublikasikan melalui media televisi lokal dengan kemasan yang lebih menarik tanpa meninggalkan unsur kedaerahannya.

Perbedaan antara televisi lokal dengan televisi nasional didasari oleh cakupan wilayah siar dan konten yang diberikannya. Cakupan wilayah siar televisi lokal lebih terbatas pada suatu wilayah tertentu. Materi tayangan televisi lokal lebih cenderung bersifat sosial, budaya, pariwisata, ekonomi, serta unsur kedaerahan lainnya, dan diharapkan melalui materi yang ditayangkan di dalamnya dapat mengangkat budaya serta kearifan lokal yang berkembang di masyarakat setempat. Sementara televisi nasional memiliki cakupan wilayah siar yang lebih luas dan konten acara yang disajikan mencakup unsur masyarakat yang lebih luas juga, tidak hanya berpatok pada suatu unsur kedaerahan tertentu.

2.2.6. Pemilukada

Pemilihan Kepala Daerah atau yang sering disingkat Pilkada adalah pemilihan langsung untuk memilih kepala daerah dan wakilnya, yang dilakukan oleh warga daerah tersebut yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih.

Pilkada dilaksanakan untuk memilih gubernur, walikota, bupati beserta masing-masing wakilnya. Sebelumnya untuk jabatan kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, namun setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah dilaksanakanlah pemilihan kepala daerah pertama kali, yaitu pada tahun 2005.

Dalam bab I Undang-undang tersebut tertulis:

21. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah KPU Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di setiap provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Pada saat itu pilkada belum masuk dalam rezim pemilihan umum, namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada termasuk dalam pemilihan umum dan diubah namanya menjadi Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Penyelenggara pemilukada adalah Komisi Pemilihan Umum provinsi, kabupaten dan kota. Sementara pengawas berlangsungnya pemilukada adalah Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Kabupaten dan Kota.